BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari yang namanya perkawinan adat, karena keberagaman yang dianut oleh masyarakat dari berbagai suku, budaya adat dan istiadat, Sehingga dalam keberagaman ini membuat pemerintah turut menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum serta hak-hak tradisional yang masih melekat dan dipakai di dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan yang dilangsungkan secara Adat, tetap diakui di Indonesia selama sah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, jadi perkawinan adat tetap lah sah apabila telah melalui prosesi perkawinan secara keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Hukum Adat memandang Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹

¹Erni Djun and Muhammad Tahir, “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 4 No. 2, 2022, hlm. 3. (n.d.): 119–28, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1574>.

Dikutip dari buku K. Wantijk Saleh dalam Jurnal M. Nurul Huda, dan Abdul Munib, *Voice Justitia* Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam, menyatakan bahwa Hukum Islam memandang bahwa tujuan dari perkawinan ialah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan dari perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.²

Masyarakat Hukum Adat yang mengutamakan adanya keturunan setelah dilangsungkannya Perkawinan ialah Masyarakat Adat Batak Toba baik itu beragama Kristen maupun Muslim, karena keluarga merupakan komponen perekat meski di dalamnya terdapat ragam perbedaan agama.

Seperti halnya suku lain yang menginginkan adanya keturunan/anak sebagai penerus, masyarakat Adat Batak Toba juga demikian halnya. Memiliki keturunan ialah salah satu dari 3 nilai budaya yang harus dicapai. Masyarakat Adat Batak Toba menjunjung nilai-nilai budaya yang penting untuk dicapai yakni *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan), dan *hasangapon* (kehormatan), sehingga pasangan suku Batak Toba yang belum memiliki anak akan berupaya sekuat tenaga melakukan berbagai usaha agar memiliki

²Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law", *Voice Justitia*, Vol 6 No. 2, 2022, hlm. 45. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3342671>.

keturunan atau anak khususnya anak laki-laki yang kelak sebagai penerus marga.³

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sehingga orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.⁴ Hukum Positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Pengertian anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

*Child is a mandate as well as a gift of God Almighty, which must be taken care of because in his/her inherent dignity, values and rights as a human being which must be upheld. In order to ensure the development of the child, guidance and protection toward the children are necessary, to sustain the nation's future in the later time. Adoption is one way to do protection toward children.*⁵

³Muhammad Abrar Parinduri, "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Budaya Batak Toba," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 3 (December 30, 2020), <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1075>.

⁴Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No.2, 2022, Hlm. 27. n.d.,[https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/22612?issue=Vol 6 No 2 \(2022\): September 2022](https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/22612?issue=Vol 6 No 2 (2022): September 2022).

⁵Rema Syelvita, dkk., The Implementation of adoption at the department of social of Bengkulu city as a protection effort toward the adopted children, *Bengkoelen Justice*, Vol 7 No. 2, 2017, Hlm. 247.

Anak adalah Amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dirawat, karena martabat dirinya, nilai-nilai dan hak-hak sebagai manusia

Pengaturan mengenai definisi Anak juga diatur dalam Hukum Adat di Indonesia, dimana seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum pernah menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.⁶

Pentingnya keturunan laki-laki menjadi pendorong masyarakat Adat Batak Toba untuk mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan laki-laki, salah satu diantaranya ialah dengan melangsungkan perkawinan kedua dengan cara melangsungkan perkawinan di bawah tangan yang disebut dengan perkawinan *Pasu-Pasu Raja*, dimana dalam perkawinan ini, laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi pasangan suami istri hanya dengan menerima pemberkatan dari *raja-raja ni huta*, dalam hal ini adalah (orang-orang yang dituakan di kampung, ketua-ketua adat, serta perwakilan keluarga dari kedua belah pihak).

⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2021, Hlm. 37.

Adat Batak Toba yang menganut sistim kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan melalui kebpakan dan menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus keatas.⁷

Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* ini bisa terjadi apabila terjadi poligami, hubungan sosial (hamil diluar nikah), atau karena tidak memiliki keturunan, khususnya keturunan laki-laki.⁸ Dimana kedudukan laki-laki dianggap sangat penting sehingga tidak mendapatkan keturunan laki-laki dari istri pertama yang menyebabkan sang suami di izinkan untuk menikahi wanita lagi dengan cara *Pasu-Pasu Raja*, meski pada hakekatnya masyarakat Batak Toba tidak mengenal sistim Poligami.

Praktik Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* ini tentu tidak sah secara hukum dimana dalam Pasal 2 Ayat (2) akibat hukum perkawinan *Pasu-Pasu Raja* adalah tidak dicatatnya perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum yang tetap sehingga di mata hukum negara, perkawinan *Pasu-Pasu Raja* tidak sah dan berdampak pada:

- a) istri yang tidak dianggap sebagai istri yang sah,
- b) anak yang dilahirkan tidak sah dan hanya ada hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

⁷Muhammad Alfayed Suherman, Keabsahan Hukum Adat Batak Toba, *Hangoluan Law Review*, hlm.2, <https://osf.io/exktr/download/?format=pdf#:~:text=Pada%20Hukum%20Perkawinan%20Adat%20Batak%20terdapat%20suatu,sebagai%20saudara%20sepupu%20kandung%20yang%20berbeda%20marga.&text=Orang%20tua%20bapak%20M%20Panjaitan%20mengatakan%20bahwa,perkawinan%20ideal%20pada%20masyarakat%20adat%20batak%20Toba>.

⁸Ilham Tua Naibaho, Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* Pada Masyarakat Adat Batak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Hangoluan Law Review*, Vol 1 No. 2 Tahun 2022, Hlm. 5. <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/16>

c) hilangnya hak menuntut atas harta gono-gini, hak menuntut nafkah dan harta waris.

Faktor penyebab masih dilaksanakannya perkawinan *Pasu-Pasu Raja* antara lain:

- a) kesadaran hukum yang rendah
- b) faktor poligami,
- c) faktor hubungan sosial.⁹

Pelaksanaan *Pasu-Pasu Raja* ini tidak dilangsungkan menurut agama, sehingga tidak dapat dicatatkan, dalam UUP dikatakan bahwa, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Status atau kedudukan dari anak yang lahir akibat dari Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* ini dianggap anak tidak sah, apabila ditinjau dari UUP. Berbeda halnya dalam Adat Batak Toba itu sendiri, anak yang lahir akibat perkawinan *Pasu-Pasu Raja* dianggap sah.

setiap anak yang lahir dari perkawinan *Pasu-Pasu Raja* akan tetap menarik garis keturunannya melalui garis ayah, dengan memakai nama marga ayah. karena tujuan marga ialah untuk melanjutkan keturunan dan membina solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur.¹⁰

namun berdasarkan Hukum Adat Batak Toba, pengaruh perkawinan *pasu-pasu raja* terhadap kedudukan anak laki-laki berpengaruh terhadap

⁹Ilham Tua Naibaho, *Op.cit.*, hlm. 236.

¹⁰Puji Ayu Setyani Sitorus, Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perantauan, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7855>

pembagian warisan dan juga posisi orang tua dalam memberi dan menerima adat.

Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan yang melakukan Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* berdampak pada hilangnya tuntutan atas harta bersama jika perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena kematian, hak menuntut nafkah, harta waris, atau harta bersama yang diperoleh akibat perkawinan *Pasu-Pasu Raja* tidak dicatat hanya dikuasai oleh masing-masing yang menghasilkan harta tersebut. Hal ini berpengaruh pada status atau kedudukan anak yang lahir akibat Perkawinan tidak tercatat yang dalam hal ini ialah *Perkawinan Pasu- Pasu Raja*, dimana sang anak akan sulit mendapatkan haknya baik secara hukum positif maupun hukum adat Batak Toba.

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba di Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan yang pernah melakukan perkawinan di bawah tangan, dimana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terdapat lebih dari 5 (lima) pasangan yang melangsungkan perkawinan *Pasu-Pasu Raja*, dan masing-masing diantaranya telah memiliki keturunan.

Berdasarkan penelitian mendasar yang dilakukan oleh penulis kebanyakan dari faktor yang mempengaruhi banyaknya perkawinan di bawah tangan atau *Pasu-Pasu Raja* dalam masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Sijamapolang adalah karena melangsungkan perkawinan kedua kalinya tanpa perceraian sebelumnya dengan istri pertama akibat tidak memiliki keturunan

laki-laki dari istri pertama yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan di Gereja secara sah, karena Gereja menentang keras bagi pasangan yang melakukan hubungan asusila (hamil di luar nikah), sehingga bentuk pertanggung jawaban yang dapat dilakukan pihak laki-laki ialah dengan menikahkan perempuan dengan cara *Pasu-Pasu Raja*.

Masyarakat adat Batak Toba yang hidup tidak hanya diatur oleh Hukum Negara, Hukum Adat, namun juga ada Hukum dan aturan dari Gereja yang mengatur mengenai perkawinan di bawah tangan bagi pemeluk agama Kristen, bahwasanya mengutip dari Buku Hasil Rapat Sinode yang menyatakan beberapa poin dan aturan mengenai rumah tangga dan perkawinan:

- a) Bagi warga jemaat yang melakukan perkawinan terlarang (perkawinan yang tidak dilaksanakan dalam kebaktian pemberkatan pernikahan secara Kristiani, baik di gereja ataupun di rumah, perkawinan yang hanya dikukuhkan oleh tua-tua adat, perkawinan poligami, kawin kontrak, kumpul kebo, perkawinan sejenis, perkawinan dengan menantu), setelah dilakukan penerimaan dan dikukuhkan menjadi keluarga yang sah di GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) maka di berikan akte Pernikahan ataupun Surat Keterangan Menikah sesuai dengan tanggal pernikahan, tujuannya adalah untuk merespon peraturan pemerintah tentang catatan sipil perkawinan yang membutuhkan Akte Pernikahan ataupun Surat Keterangan Menikah dari Gereja, dan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan itu diperlakukan sebagai anak-anak yang sah,

- b) bagi suami istri yang melakukan poligami dikenakan Tata Penggembalaan dalam bentuk pengakhiran keanggotaan yang bersangkutan dapat diterima kembali bila yang bersangkutan kembali menjalani perkawinan monogami.¹¹

Pasu pasu raja ini menjadi alternatif penyelesaian masalah perkawinan secara adat, namun secara Hukum Perkawinan Indonesia hal ini tentu bertentangan. Anak yang lahir akibat perkawinan *Pasu-Pasu Raja* merupakan anak tidak sah meski secara adat Batak Toba anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah. Namun untuk pemenuhan hak-hak yang didapatkan oleh anak tidak terpenuhi.

Status anak yang lahir dari perkawinan *Pasu-Pasu Raja* ini merupakan anak yang sah menurut hukum adat, namun secara hukum positif anak yang lahir dianggap sebagai anak tidak sah. hal ini menjadi masalah yang cukup kontroversi dalam masyarakat Batak Toba, dimana masyarakat yang semakin sadar akan hukum, sehingga status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan *Pasu-Pasu Raja* dipermasalahkan dan berimbas pada anak dan keluarga yang mendapat respon yang kurang baik karena prosesi pencatatan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* ini, sehingga si anak pun sering tidak mendapatkan hak nya secara penuh sebagaimana seharusnya, namun karena perbedaan antara perspektif hukum perkawinan Indonesia dan hukum adat

¹¹Sahala Sitompul, *Tata Penggembalaan GKPI*, Kolportase GKPI, Pematang Siantar, 2017, hlm.24.

Batak Toba memandang status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

Secara Hukum Positif dampak Hukum Perkawinan di bawah tangan adalah; Perkawinan dianggap tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu, Anak dan Ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Sementara menurut Abdul Manan, bahwa akibat dari perkawinan tidak tercatat yaitu suami istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan, anak-anak tidak memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah secara hukum.

Namun berbeda halnya dengan Hukum Adat Batak Toba yang menyatakan *Pasu-Pasu Raja* ialah perkawinan yang sah, sehingga anak yang dilahirkan sah di mata adat dan berhak atas warisan dan selama mengikuti setiap rangkaian prosesi dan ketentuan adat.

Berdasarkan uraian diatas sehingga Penulis tertarik mengangkat judul **“Status Hukum Anak Laki-Laki Pada Perkawinan *Pasu-Pasu Raja*: (Studi Kasus di Desa Sigulok)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan *Pasu-Pasu Raja* diterapkan dalam masyarakat adat di Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Bagaimana Status Anak laki-laki yang lahir dari Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* dalam masyarakat Adat di Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* yang dilaksanakan di Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari pelaksanaan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* di Desa Sigulok, Kec. Sijamapolang, Kab. Humbang Hasundutan terhadap status hukum anak laki-laki dalam konteks masyarakat adat Batak Toba.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai penambahan ataupun perbandingan teori-teori yang telah ada berkaitan dengan perlindungan hukum anak akibat perkawinan *pasu pasu raja* secara Hukum Adat Batak Toba.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan klarifikasi mengenai status hukum

anak laki-laki yang lahir dari perkawinan *pasu pasu raja*, baik menurut hukum Adat Batak Toba, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori konsep atau konsep yang dapat mendukung penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian, kerangka konseptual tersebut berfungsi untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dari itu berikut akan diuraikan beberapa istilah yang akan dipakai, yakni sebagai berikut:

1. Status Hukum

Status Hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya¹². Status Hukum juga berarti identitas hukum yang diakui oleh seseorang, badan, perkumpulan, atau perusahaan yang mempunyai kesanggupan yang cukup untuk memikul kewajiban dan melakukan kegiatan yang menimbulkan tanggung jawab hukum penuh terhadap dirinya sendiri dan pihak ketiga.

2. Anak Laki-Laki

Menurut Pasal 330 KUHPer Anak ialah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dalam Masyarakat Adat Batak Toba

¹² Repository UNIMAR AMNI Semarang, <http://repository.unimaramni.ac.id/2698/2/9.%20BAB%202.pdf>, Diakses pada 07 Desember 2024, Pukul 11.22 WIB.

sendiri pengertian dari anak laki-laki ialah keturunan lelaki yang dapat meneruskan marga.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang Wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (2) perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

4. *Pasu-Pasu Raja*

Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* adalah dalam suatu perkawinan, laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi pasangan suami istri hanya dengan menerima pemberkatan dari *raja-raja ni huta* dalam hal ini adalah orang-orang yang dituakan di kampung, ketua adat, serta perwakilan keluarga dari kedua belah pihak.¹⁴

5. Desa Sigulok

¹³Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.

¹⁴Ilham Tua Naibaho, *op.cit.*, hlm. 235.

Desa Sigulok adalah salah satu diantara 10 (sepuluh) Desa yang terletak di Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri yaitu:

- a) Hukum Positif itu adalah Perundang-undangan.
- b) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d) Hukum Positif tidak boleh mudah diubah.¹⁵

Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

¹⁵ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18.

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum adalah adanya aturan umum yang membiarkan individu mengetahui tindakan apa yang harus diambil, dan salah satunya adalah bentuk jaminan legitimasi individu terhadap kesewenang-wenangan negara. Karena aturan umumnya adalah bahwa seorang individu dapat mengetahui kondisi apa yang dapat dikenakan atau apa yang harus dilakukan dengan individu tersebut.¹⁶ Menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga dijelaskan bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Relevansi teori kepastian hukum dengan penelitian ini, yaitu agar terciptanya kepastian hukum dari anak laki-laki yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (*Pasu-Pasu Raja*) untuk mencapai regulasi yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum itu sendiri mengenai status hukum anak, khususnya bagaimana status dari anak laki-laki dalam hukum adat Masyarakat Adat Batak Toba.

2. Teori keadilan

John Rawls mendefinisikan Keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Berikut beberapa pendapatnya mengenai keadilan:

¹⁶ Agatha Jumiati, Ellectrananda Anugerah A., Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia, Jurnal Ius Civile, Vol 6 No.1, Tahun 2022, hlm. 30.

- a) Keadilan merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, dengan kata lain individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas, karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan procedural murni. Dalam keadilan procedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri.
- c) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup beberapa hal berikut diantaranya adalah kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua adalah prinsip perbedaan.

Teori keadilan Rawls *justice as fairness*, menurut Rawls adalah jalan untuk menuju masyarakat yang tidak hanya menjamin kebebasan setiap anggotanya dalam mengejar tujuan hidupnya, tetapi juga mengusahakan kesetaraan diantara anggota-anggotanya; masyarakat yang didukung oleh

kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.¹⁷

Relevansi dari teori keadilan dengan penelitian ini, yaitu agar tercipta keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (*Pasu-Pasu Raja*) sesuai dengan prinsip keadilan.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul “Status Hukum Anak Laki-Laki Pada Perkawinan *Pasu-Pasu Raja*” telah dilakukan beberapa penelitian, namun penelitian-penelitian tersebut tidak secara khusus membahas mengenai status anak yang lahir dari perkawinan *Pasu-Pasu Raja* dalam perspektif Hukum Adat Batak Toba.

No	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Pelaksanaan Proses <i>Pasu-Pasu Raja</i> (Perkawinan yang Hanya Dilakukan Oleh Mempelai, Keluarga, dan Penatua Adat) Bagi Pasangan yang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan Di	Penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan Perkawinan <i>Pasu-Pasu Raja</i> bagi pemuda/I	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa <i>Pasu-Pasu Raja</i> hanya dilaksanakan bagi muda-mudi

¹⁷Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.10.

	Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	yang berbuat asusila.	yang salah Langkah.
2.	Tinjauan Yuridis Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan	Penelitian ini hanya berfokus kepada status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan secara umum dan bukan status hukum anak yang lahir dari perkawinan <i>pasu</i> <i>pasu raja</i> .	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa status seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai jalinan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya.
3.	Perkawinan <i>Pasu-Pasu Raja</i> Pada Masyarakat Adat Batak Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Penelitian ini hanya membeahas mengenai bagaimana pelaksanaan dari	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan <i>Pasu-Pasu Raja</i>

		<p>perkawinan <i>pasu pasu raja</i> di lokasi peneliti tanpa membahas lebih lanjut mengenai status anak yang lahir akibat perkawinan tersebut.</p>	<p>adalah perkawinan tidak sesuai ajaran agama Kristen, sehingga berakibat dikenakan siasat gereja berupa pembatasan hak-hak sebagai jemaat atau dikeluarkan sebagai jemaat gereja, dan berdasarkan hukum negara perkawinan ini tidak sah.</p>
--	--	--	--

Pada penelitian yang pertama, penelitian pada Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Proses *Pasu-Pasu Raja* (Perkawinan yang Hanya Dilakukan Oleh Mempelai, Keluarga, dan Penatua Adat) Bagi Pasangan yang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan Di Kelurahan

Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”, merupakan skripsi yang dibuat oleh Jesica Ines Sinaga. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021. Penelitian tersebut membahas bahwa masyarakat Adat Batak Toba Perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang sistim kekerabatannya patrilineal dengan menggunakan bentuk perkawinan eksogami, menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba menjunjung tinggi nilai adat istiadat dalam perkawinan dalam perkawinan suku Adat Batak Toba, dan pelaksanaan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* (perkawinan yang hanya dilakukan oleh mempelai, keluarga dan Penatua Adat) bagi muda mudi yang salah langkah.¹⁸

Pada penelitian kedua, yaitu pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan”, merupakan skripsi yang dibuat oleh Rini Setiawati, Mahasiswi Fakultas Hukum Univeristas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022. Penelitian ini khusus membahas mengenai status anak hasil perkawinan di bawah tangan ditinjau dari hukum Nasional, hasil penelitian ini menyatakan bahwa status seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai jalinan keperdataan atas ibunya dan keluarga ibunya, serta akibat dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, serta akibat

¹⁸ Jesica Ines Sinaga, *Pelaksanaan Proses Pasu-Pasu Raja (Perkawinan yang Hanya Dilakukan Oleh Mempelai, Keluarga, dan Penatua Adat) Bagi Pasangan yang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, Tahun 2021.

yang lebih jauh lagi ialah si anak tidak berhak menuntut nafkah, biaya Pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Pada penelitian ini murni membahas dari sudut pandang hukum nasional tanpa membahas mengenai perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum adat Batak Toba.¹⁹

Kemudian pada penelitian ketiga yaitu pada skripsi yang berjudul “Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* Pada Masyarakat Adat Batak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan *Pasu-Pasu Raja* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian ini bahwa akibat Hukum perkawinan *Pasu-Pasu Raja* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan *Pasu-Pasu Raja* adalah perkawinan tidak sesuai ajaran agama Kristen, sehingga berakibat dikenakan siasat gereja berupa pembatasan hak-hak sebagai jemaat atau dikeluarkan sebagai jemaat gereja.²⁰

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, sama-sama mengkaji tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan secara hukum positif dan membahas mengenai perkawinan di bawah tangan dari perspektif hukum adat Batak Toba. Untuk penelitian yang pertama sama-sama membahas perkawinan di bawah tangan dalam adat Batak Toba namun hanya berfokus pada perkawinan nya saja, penelitian kedua sama-sama membahas mengenai

¹⁹Rini Setiawati, *Tinjauan Yuridis Status Anak dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan*, 2022.

²⁰Ilham Tua Naibaho, *Op. cit*, hlm.231.

status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, dan pada penelitian ketiga sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah adanya kesamaan mengenai pembahasan status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat namun hanya dari perspektif hukum positif saja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan kajian terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dipandang dari dua sisi hukum yakni Hukum Perkawinan Indonesia dan juga Hukum Adat Batak Toba.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu “Penelitian yang melihat sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat dan penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya dimana titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada”.²¹ Penelitian Yuridis Empiris atau Sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.²²

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123-125.

²²Teuku Saiful Bahri Johan, *Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum*, Depublish Digital, Sleman, 2020, hlm. 388.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Secara yuridis dengan melihat Hukum Adat Batak Toba yang berlaku di Desa Sigulok, Kec. Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan mengenai keabsahan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* dan bagaimana status hukum dari anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Secara empiris menggunakan metode pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi yang terjadi, yang dalam hal ini ialah *Pasu-Pasu Raja* yang dilaksanakan di Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Lokasi penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Sigulok, di Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Pemilihan Desa Sigulok diantara 10 Desa yang ada di Kecamatan Sijamapolang ialah karena pada desa tersebutlah masih didapati adanya praktik pelaksanaan perkawinan *Pasu-Pasu Raja*.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan secara menyeluruh mengenai fenomena hukum berkaitan dengan status anak laki-laki yang lahir dari perkawinan *Pasu-Pasu Raja* apabila dipandang dari perspektif Hukum Adat Batak Toba.

b. Sumber Data Hukum

Sumber data merujuk pada semua informasi yang diperoleh melalui observasi langsung, yang dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang bersumber dari:

a) Data Primer, yaitu:

Data yang diperoleh secara empiris yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya dengan cara observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner. Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dari masyarakat terkait di Kecamatan Sijamapolang mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan *Pasu-Pasu Raja*.

b) Data Sekunder, yaitu:

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua), yang diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur-literatur tidak terbatas seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya²³, diantaranya yang digunakan penulis ialah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

²³Pusat Pendidikan et al., "Modul Pelatihan Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI)," n.d., <http://www.pusdiklat.kemdikbud.go.id>, diakses pada 03 oktober 2024, Pukul 13.00 WIB.

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 20 November 1989.

c) Data Tersier, yaitu:

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain, pihak-pihak yang diwawancarai.

4. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba yang melakukan Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* di Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, mereka yang melakukan Perkawinan di bawah tangan sebanyak 10 (sepuluh) pasangan. Dari 10 (sepuluh) pasangan ini yang menjadi sampel penelitian yaitu mereka yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan (*Pasu-Pasu Raja*) dari tahun 2014 sampai tahun 2024 dan masing-masing keluarga dipilih dari Desa Sigulok.

Tabel 1.1
DATA PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN PASU-PASU RAJA TAHUN 2014-2024

No.	Nama	Tahun	Jumlah anak	Jumlah anak laki-laki
1.	T. Siagian/Br. Sihombing	2014	6	1
2.	V.Simamora/Br. Silaban	2015	3	1
3.	B. Purba/Br. Gultom	2016	4	3
4.	J.Purba/Br.Nababan	2017	2	1
5.	D.Simamora/Br. Simanungkalit	2018	4	1
6.	H.Simamora/Br.Ritonga	2018	5	2
7.	R. Purba/Br.Sinaga	2020	4	2
8.	A.Sihombing/Br.Purba	2020	3	2
9.	F.Nainggolan/Br.Simamora	2020	2	1
10	J.Purba/Br.Sitanggang	2021	1	1

Sumber: Ratman Purba (Masyarakat Desa Sigulok)

Berdasarkan data tersebut, sejak sepuluh tahun terakhir tercatat yang paling banyak melakukan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* ialah pada tahun 2020 dimana terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan dalam waktu satu tahun, berdasarkan hal tersebut juga penulis berupaya untuk mengemukakan praktik perkawinan *Pasu-Pasu Raja* yang tidak sah secara hukum positif, yang sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah bagi pasangan dan anak-anaknya.

Alasan penulis melakukan penelitian di desa tersebut karena di desa tersebut yang masih melaksanakan perkawinan di bawah tangan yang dalam hal ini adalah *Pasu-Pasu Raja* yang secara hukum positif bertentangan dan berdampak pada status hukum anak akibat perkawinan yang tidak sah.

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel secara *purposive sampling* disebut sampel bertujuan artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau ciri-ciri tertentu yang dipilih mewakili dari populasi yang sudah diketahui.²⁴

Adapun responden dan informan penelitian ini yaitu:

Responden masyarakat meliputi 5 (lima) pasangan, dan 1 (satu) tokoh adat di Desa Sigulok.

- 1) Penentuan responden pasangan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* di Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang.
- 2) Penentuan informan tokoh adat (*natua-tua ni huta*) yang dipilih (satu) orang Ketua Adat di Desa Sigulok, dengan pertimbangan dan ketentuan bahwa mereka dianggap mengetahui permasalahan yang sedang penulis teliti.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan perpustakaan.

- a) Wawancara (*interview*)

²⁴Bahder Johan Nasution *op. cit.*, hlm.86

Untuk memperoleh data, penulis langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan tanya jawab langsung kepada responden dengan tua-tua adat, pegawai pencatatan sipil dan kepada pasangan perkawinan di bawah tangan (*Pasu-Pasu Raja*) guna mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan adat Batak Toba.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan (hasil wawancara, observasi, atau kuisisioner) menjadi informasi yang bermakna dan dapat diinterpretasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini sangat krusial karena akan menentukan kualitas dan reliabilitas hasil penelitian.

b) Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan menganalisis secara yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Sijamapolang. Dari data yang diperoleh yaitu data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, ditarik suatu kesimpulan dengan

metode induktif yaitu dari data yang bersifat umum dirumuskan dalam bentuk pernyataan.

I. Sistematika Penulisan

Guna mendapat gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penulis membagikannya dalam 4 (empat) bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi uraian tentang Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* dan pelaksanaannya, keabsahan *Pasu-Pasu Raja*, serta status hukum anak akibat perkawinan *Pasu-Pasu Raja*.

BAB III: Pembahasan

Pada bab ini diuraikan pembahasan mengenai faktor pelaksanaan perkawinan *Pasu-Pasu Raja*, akibat hukum perkawinan *Pasu-Pasu Raja* bagi anak, dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang terlahir dari perkawinan *Pasu-Pasu Raja*.

Bab IV: Penutup

Sebagai akhir penelitian ini, maka bab ini menyajikan beberapa sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat dengan tujuan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam perumusan masalah sebelumnya berdasarkan data yang diperoleh dan dipaparkan dalam bab pembahasan.